

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

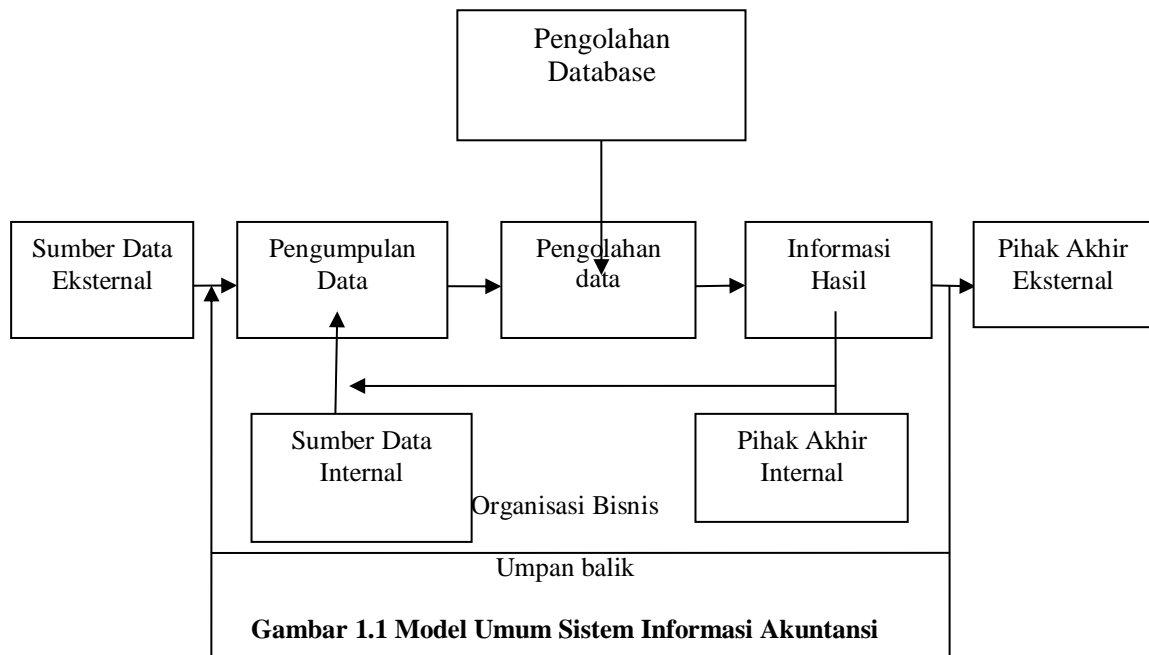
### **1.1. Latar Belakang**

Perkembangan teknologi informasi, terutama pada era informasi berdampak signifikan terhadap Sistem Informasi Akuntansi (SIA) yang dapat memenuhi kebutuhan dalam memperoleh informasi yang cepat, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan. Keberadaan sistem informasi akuntansi dipandang sebagai komponen penting pada divisi keuangan di setiap perusahaan baik sektor swasta maupun sektor publik, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah adalah penerapan sistem mulai dari tahap pengelompokan penggolongan, pencatatan dan pemrosesan aktivitas keuangan pemerintah daerah kedalam sebuah laporan keuangan sebagai suatu informasi yang dapat digunakan oleh pihak tertentu dalam pengambilan keputusan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) merupakan suatu instrumen organisasional yang tergabung kedalam bagian sistem informasi dan teknologi yang dirancang untuk membantu pengelolaan dan pengendalian dibidang ekonomi keuangan suatu perusahaan (Estebanez & Colomna 2011:01)

Model umum Sistem Informasi Akuntansi (SIA) yang dapat diterapkan untuk seluruh sistem informasi tanpa memandang bagaimana rancangan teknologi disetiap organisasi. Dalam gambar tersebut tampak terdapat beberapa elemen yang terlibat, yaitu pengguna akhir (*endusers*), sumber data (*datasources*)

pengumpulan data (*data collection*), pemrosesan database (*database management*), hasil informasi (*information generation*), dan umpan balik (*feedback*) (Ihda & Arifin Faiz 2016:4)



Tahap pertama dalam proses Sistem Informasi Akuntansi (SIA) adalah pengumpulan data pada tahap ini, harus dapat dipastikan bahwa masukan data berasal dari sumber yang valid dan terbebas dari kesalahan material. Mekanisme tahapan ini harus dapat menunjukkan relevansi dan berlangsung efisien, sistem harus mampu menangkap data yang relevan dan mengumpulkannya cukup sekali. Setelah data dikumpulkan, maka tahap selanjutnya adalah menyimpannya di pengelolaan database (*database management*) yang nantinya dapat diproses menjadi informasi mulai dari tahap sederhana hingga cara pemrosesan yang kompleks, tergantung kebutuhan atas informasi dan jenis data yang digunakan misalnya pemakaian logaritma, teknik statistik, prediksi penjualan dan prosedur

pemeringkasan yang digunakan dalam akuntansi. Hasil informasi yang diperoleh dari pengolahan data akan dilanjutkan kepengguna akhir eksternal dan pengguna akhir internal. Termasuk dalam kategori pengguna akhir eksternal adalah kreditur, stakeholder, investor, institusi pemerintahan (*regulatory agencies*), penyuplai dan pelanggan. Adapun yang termasuk dalam kategori pengguna akhir internal adalah manajemen disetiap tingkatan keorganisasian umpan balik (*feedback*) atas informasi yang disajikan dapat dikirimkan ke entitas sehingga dapat diketahui perihal apa saja yang dapat dipertahankan atau perlu dilakukan perbaikan. (Faiz Zamzani 2016:05)

Struktur pemerintahan daerah, khususnya Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) merupakan unsur pelaksanaan pemerintah daerah di bidang pengelola keuangan dan aset daerah sesuai dengan kewenangan pemerintah kabupaten serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dapat mempercepat pengelolaan keuangan daerah dan menyediakan informasi keuangan yang komprehensif kepada masyarakat luas yang bertujuan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Transparansi dapat diartikan sebagai hak masyarakat untuk mengetahui kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang ada di daerah, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan hasil yang dicapai dari tugas pengelolaan tersebut, termasuk pengelolaan keuangan daerah.

Tingginya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (SIKD). Selain

pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh sistem pengendalian internal apabila penerapan sistem pengendalian internal yang lemah dapat menyebabkan sulitnya mendeteksi kecurangan dan tidak akuratnya proses akuntansi sehingga bukti audit yang diperoleh tidak kompeten. Sistem Pengendalian Internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan tertentu.

Pada peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 dijelaskan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, efisien dan keandalan pelaporan keuangan.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang disingkat (SPIP) adalah sistem pengendalian internal pemerintah yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan adanya dukungan sistem pengendalian internal yang baik tentunya akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan peraturan Badan Pengawas Keuangan (BPK) dan pembangunan republik indonesia nomor 5 tahun 2021 tentang penilaian penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah terintegrasi pada kementerian lembaga pemerintah daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di susun dengan berpedoman pada standar akuntansi

pemerintah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berkualitas harus memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 yakni relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Dengan menerapkan kriteria tersebut dalam laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah dapat dikatakan berkualitas.

Laporan keuangan pemerintah daerah setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Badan Keuangan (BPK) pada tahun 2013 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten OKU mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), setahun kemudian tepatnya pada tahun 2014 LKPD Kabupaten OKU masih tetap mendapat Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) karena belum memadainya pengelolaan persediaan, aset tetap dan aset lainnya.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) mencakup evaluasi, atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten OKU serta evaluasi

atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Badan Pengawa Keuangan (BPK) yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat sebagai dasar untuk menyatakan opini. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK Kabupaten OKU menyajikan secara Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam semua hal yang material posisi keuangan, dari tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan 31 Desember 2022 dan realisasi anggaran, perubahan saldo, anggaran lebih operasional, arus kas serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi.

Dari hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 15 september 2023 terdapat kendala dalam meningkatkan keamanan dengan menggunakan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten OKU khususnya mengenai laporan keuangan adalah kurangnya prasarana kearsipan dan belum terlaksana dengan maksimal terhadap penatausahaan kearsipan yang dinamis.

Laporan keuangan merupakan suatu kebutuhan baik bagi pemerintah maupun pihak-pihak yang berkepentingan entitas dalam menjalankan kegiatannya, pengelolaan keuangan pemerintah daerah perlu adanya pemahaman terhadap sistem informasi akuntansi. Fenomena yang terjadi diatas, meskipun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan (BPK) mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tetapi dalam pengelolaan laporan keuangan masih terdapat hambatan- hambatan dalam pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal.

Berdasarkan hasil penelitian Askandar Rohman & Sari (2020) yang menyatakan bahwa Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah artinya semakin tinggi pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan, begitu pula apabila semakin baik sistem pengendalian internal maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus BKAD) Kabupaten OKU”**

### **1.2. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu Apakah ada Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus BKAD) Kabupaten OKU secara parsial dan simultan?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah (Studi kasus BKAD) Kabupaten OKU secara parsial maupun simultan.

#### **1.4. Manfaat penelitian**

Setiap penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat baik untuk diri sendiri maupun orang lain, terlebih lagi untuk perkembangan ilmu pengetahuan untuk itu yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah:

#### **1.4. Manfaat teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan bermanfaat untuk pengembangan ilmu, yakni memberikan wawasan serta dapat digunakan sebagai landasan dan bahan pertimbangan untuk melakukan pengembangan penelitian selanjutnya yang sama bagi pihak yang berkepentingan baik internal maupun eksternal.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan dapat menjadi tolak ukur bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) khususnya laporan keuangan pemerintah daerah.